PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEDAGANG PERANTARA DAN PERANTARA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Faridy,
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Email; farid123.ach@gmail.com

Ainul Yakin
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Email; yakin4255@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pedagang perantara dan Perantara Perdagangan. Untuk membahas isu hukum yang dikaji menggunakan paradigma penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum skunder yang bersumber dari buku dan jurnal-jurnal hukum ilmiah. Hasil dari penelitian ini ialah, pedagang perantara dan perantara perdagangan ialah proses penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian. Perlindungan hukumnya ialah berupa perjanjian yang berisi suatu rangkaian atau kalimat-kalimat yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pelaku pedagang perantara ini tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, sementara UUPK tidak menyebutkan secara spesifik bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akhir mungkin melibatkan perantara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan

ABSTRACT

This article discusses legal protection for intermediary traders and Trade Intermediaries. To discuss legal issues studied using a normative legal research paradigm. The approaches used in this research are the statute approach and the conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials which include related laws and regulations and secondary legal materials sourced from books and scientific legal journals. The results of this research are that intermediary traders and trade intermediaries are processes of ordering, granting power of attorney, or agency. The main basis of brokerage activities is a contract or agreement. Legal protection is in the form of an agreement which contains a series or sentences containing promises or undertakings spoken or made in writing by the parties making the agreement. These intermediary traders must of course be given adequate legal protection, while the UUPK does not specifically mention that intermediaries may be involved between business actors and final consumers.

Keywords: Legal Protection, Intermediary Traders and Trade Brokers

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diakui atau tidak, pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tidak konsekuensi dapat menyebabkan persaingan bisnis dalam setiap kota, sehingga menimbulkan kompetisi yang semakin tajam¹. Akibatnya, banyak orang atau perusahaan menggunakan jasa-jasa pihak lain untuk mempercepat akselerasi perdagangannya dengan cara menggunakan perantara, baik dalam kepentingan menjual barang atau membeli barang. Penggunaan jasa keperantaraan ini modelnya beragam, ada yang menggunakan Perjanjian, Kontrak, Persetujuan, Contract, Agreement².

Dalam praktik bisa era sekarang, lembaga keperantaraan dalam bidang perniagaan (agency) menunjukkan peran yang makin meningkat. Bahkan, terkadang transaksi bisnis tersebut harus dilakukan melalui perantara. Dengan kata lain, lembaga ini makin berkembang dalam praktik, sehingga dikenal seperti perantara dagang makelar³. Hal ini

sebagai akibat dari perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan. Untuk menghadapi persaingan, maka perusahaan perlu melaksanakan usaha kegiatan pemasaran dengan menggunakan saluran distribusi yang tepat sehingga tujuan bias dapat dicapai. Tujuan utama perusahaan pada intinya sama, yaitu dapat meningkatkan volume penjualan sehingga laba yang dihasilkan akan terus meningkat, namun tanpa meninggalkan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen.

Perkembangan dunia usaha dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Peningkatan itu disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk memenuhi akan permintaan suatu kebutuhan. Komponen utama dalam perdagangan ialah beragam bentuk transaksi seperti Business to Business (B2B), Business to Customers (B2C), dan lain-lain⁴. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat 3 (tiga) disebutkan bahwa istilah mengenai pedagang perantara diantaranya makelar, agen, dan

¹ Stella, Budiman Ginting, O. K. Saidin & T. K. D. Azwar, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen Dalam E-Commerce*, Acta Law Journal, Volume 1 Nomor 1, December 2022

² Erie Hariyanto, *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*, (Surabaya; Pena Salsabila, 2011), hlm 38

³ Ridwan khairandy, Pengantar hukum dagang, hal 104

⁴ Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 347–68 (hal. 348) .

komisioner⁵. Berdasarkan uraian di atas, maka berikut beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah, bagaimana konsep pedagang perantara dan perantara perdagangan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pedagang perantara dan perantara perdagangan?

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah, bagaimana konsep pedagang perantara dan perantara perdagangan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku pedagang perantara dan perantara perdagangan?

1.3 Metode Penelitian⁶/Landasan Teoritis

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis pada penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus pada studi literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, teori

hukum dan pendapat-pendapat hukum para ahli. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum skunder yang bersumber dari buku dan jurnal-jurnal hukum ilmiah.

II. PEMBAHASAN

1. Konsep Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan

Secara konseptual, pedagang perantara merupakan unsur yang penting dalam saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan manfaat kepemilikan. Dalam konteks ini, pedagang perantara memiliki tugas untuk mencari atau menghubungkan antara prinsipal (pemberi kuasa) dengan pihak ketiga.

Secara yuridis, perantara secara otomatis harus tunduk pada peraturan

⁵ Wahyu Kuncoro, 2015, 97 *Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Raih Asa Sukses*, Tangerang, hlm 75

⁶ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 - Pasal 1819 Kitab Undnag- Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada aspek ini, perantara biasa dalam perdagangan sebagai penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak boleh bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sehingga yang menjadi para pihak adalah prinsipal selaku pemberi kuasa dengan pihak ketiga⁷. Dengan demikian, posisi pedagang perantara (*agency*) adalah suatu hal yang sangat penting di dalam dunia perdagangan. Sebab, ia berperan menjadi agen atau penyalur distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan manfaat kepemilikan.

Pihak-pihak ini membutuhkan pihak lain untuk dapat mendistribusikan barangnya untuk sampai kepada konsumen akhir. Sebuah transaksi jual

beli akan lebih mudah tercapai dengan melibatkan pihak perantara. Pihak perantara akan membuat barang lebih cepat sampai ke tangan konsumen, memenuhi kebutuhan modal dalam bentuk pinjaman, ataupun lebih mudah memasarkan kepada pihak konsumen karena memiliki jaringan dan cakupan wilayah yang lebih luas, yang mana biasanya lebih susah dijangkau oleh pihak penjual sendiri⁸.

Pedagang perantara adalah orang atau pihak yang membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh upah/komisi. Pedagang perantara adalah *lastgeving* yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Pengertian penyuruhan atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang

⁷ Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, "*Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang*," Jurnal Bina Mulia Hukum, 4.2 (2020), 347–68 (hal. 348) .

⁸ Nur Sulistyو Budi Ambarini, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional," Jurnal Hukum & Pembangunan, 48.4 (2018), 743– 62 (hal. 745)

menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Menurut Agus Sardjono istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah *lastgeving* diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Pedagang perantara ini menjadi salah satu objek studi hukum Tugas Pertama perantara adalah menghubungkan produsen dengan konsumen. Menurut M. Manulang salah satu kegiatan penting dalam setiap perusahaan, disamping produksi dan pembelanjaan adalah marketing".⁹

Dari penjelasan diatas bahwa pedagang perantara memiliki peranan penting dalam membantu para pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya karena tidak mungkin seorang pengusaha dapat melakukan pekerjaannya sendiri. Dengan demikian menjadi keharusan bagi semua pihak agar selalu tercipta hubungan baik antara para pengusaha dengan pedagang perantara, karena

sesungguhnya dalam dunia perdagangan sangat mementingkan hubungan yang harmonis dan baik.

Variasi atau macam-macam pedagang perantara ditentukan oleh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pedagang perantara. Sumber hukum kegiatan perdagangan perantara dapat ditemukan di dalam KUHD dan di luar KUHD. KUHD mengatur berbagai macam jenis pedagang perantara terdapat pada Bab IV yaitu: bursa dagang, makelar, dan kasir, dan juga terdapat pada pengaturan pada Bab V yaitu: Komisioner, ekspiditur, pengangkutan dan tentang juragan perahu melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Pengertian penyuruhan atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

- a. Bursa Dagang. KUHD memberi definisi bursa dagang sebagai suatu tempat

⁹M. Manulang, 1985, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta-Medan : BKLM, hlm 179.

pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam pelanggan perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas atas kekuasaan Menteri Keuangan. Saat ini bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek (Bursa Efek Indonesia) dan Bursa Berjangka Komoditi (Bursa Berjangka Jakarta) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan UU Pasar Modal dan UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Bentuk Usaha Bursa dagang ini adalah Perseroan Terbatas. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan perdagangan efek dan komoditi. Di dalam bursa inilah para pialang atau pedagang perantara efek dan komoditi bertemu.¹⁰

- b. Makelar. Makelar merupakan seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan

melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai mana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapatkan upah atau provisi tertentu atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa dia tidak mempunyai hubungan tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya dia harus bersumpah di muka Pengadilan Negeri yang mana termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa dia dengan tulus akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan padanya.¹¹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Makelar terbagi menjadi dua yaitu; Makelar sebagai profesi adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jendral (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan seperti

¹⁰Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112

¹¹Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, hlm. 65.

yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHD dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap (Pasal 62 KUHD). Makelar lepas adalah tindakan para pedagang perantara yang tidak diangkat oleh Presiden atau penguasa yang berwenang yang tidak melahirkan akibat hukum yang lebih dari pada akibat yang ditimbulkan dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa (Pasal 63 KUHD).

- c. Kasir. Kasir adalah seseorang yang dengan menerima upah atau provisi tertentu, dipercayai dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran. Perkembangan sekarang yang dimaksud dengan kasir sebagai pedagang perantara menurut KUHD fungsinya dilakukan oleh Bank sebagai suatu pembayaran lembaga keuangan/perusahaan yang mewakili nasabahnya dalam:

- a. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga
- b. Menerima uang dari pihak ketiga
- c. Menyimpan uang

1. Komisioner. Komisioner adalah seorang pengusaha yang atas kuasa (perintah) orang lain yang disebut dengan komiten melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama sendiri atau firma dengan mendapat upah berupa komisi. Surat untuk perjanjian komisi disebut kontra komisi. Jabatan komisioner adalah jabatan bebas artinya siapa saja boleh menjadi komisioner sedangkan orang yang memesan atau memberi order kepada komisioner disebut komiten/principal.¹² Definisi komisioner terdapat dalam pasal 76 KUHD ialah yang berbunyi: “*Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaannya atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan*

¹²Farida Hasyim, 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

menerima upahan atau provisi tertentu". Tugas komisioner ini adalah menghubungkan komiten dengan pihak ketika atas nama dirinya sendiri, ketika menjalankan tugasnya komisioner tidak mempunyai kewajiban untuk menyebut nama komitennya, dan apabila tugasnya telah sebagai komisioner berhak mendapatkan provisi dari komitennya. Komponen-komponen tugas yang dilaksanakan oleh komisioner sebagai berikut:

- a) Menerima, menyimpan, mengangasuransikan barang-barang milik prinsipalnya.
- b) Membayar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan barang-barang tersebut.
- c) Menjual barang-barang tersebut dengan harga setinggi-tingginya.
- d) Menagih pendapatan penjual dan

mengirimkan perhitungan kepada prinsipalnya.

- e) Membayar kepada prinsipalnya yaitu pendapatan kotor setelah barang dan komisi.¹³

2. Ekspediter. Ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan atau barang lainnya melalui dataran atau perairan. Orang yang disuruh ekspediter adalah pengangkut. Sedangkan ia sendiri disuruh oleh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan barang ketempat lain. Dengan demikian, tampak bahwa ekspediter adalah perantara dari pemilik barang dan pengangkut yang mengangkut barang tersebut.¹⁴
3. Pengangkut. Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan

¹³Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 18

¹⁴ Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 15

pengangkutan. Sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengiriman mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Perjanjian pengangkutan adalah salah satu bentuk dari perjanjian pemberian jasa, sebagaimana disebut dalam pasal 1601 KUH Perdata. Oleh karena itu, disamping tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kontrak, perjanjian ini juga tunjuk pada aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan pengangkutan barang dan/atau orang.

Sedangkan perantara perdagangan tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan juga pada perdagangan umum atau dapat disebut pedagang perantara yang ada di luar perusahaan. Para pembantu pengusaha

yang ada di luar perusahaan adalah mereka yang mempunyai hubungan saling menguntungkan dengan para pengusaha, para pembantu pengusaha ini berfungsi adapun ciri khasnya dari para pembantu di luar perusahaan adalah mempunyai hubungan kerja dan koordinatif dengan pengusaha.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dasar hukum pedagang perantara dan perantara perdagangan adalah perjanjian dan kontrak. Hal ini menunjukkan dalam kerja-kerja pedagang perantara dan perantara perdagangan adalah ikatan hukum yang diikat dengan hak dan kewajiban. Pasal 1313 KUH Perdata menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang atau lebih. Istilah perjanjian didalam hukum disebut sebagai perikatan. Bentuk dari perjanjian berupa suatu rangkaian atau kalimat-kalimat yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang

membuat perjanjian¹⁵. Hubungan antara perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hak yang konkrit atau suatu peristiwa.

Dalam kaitan hak-hak atau perlindungan hukum bagi pelaku pedagang perantara atau perantara perdagangan ialah bisa menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 ayat 3 UUPK disebutkan bahwa, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan. Selain itu, UUPK mengenal istilah konsumen akan tetapi tidak mengatur mengenai pedagang perantara, distributor atau agen.

Berdasarkan UUPK, pihak-pihak tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku usaha. Dalam prakteknya para pelaku usaha itu bisa saja bertindak sebagai perantara dari pelaku usaha lainnya. UUPK tidak secara jelas menyebutkan siapa saja pelaku usaha yang dimaksud, apakah pelaku usaha sebagai produsen, atau pelaku usaha

selaku perpanjangan tangan dari pelaku usaha lainnya¹⁶.

Hal tersebut kontra produktif dengan perkembangan perdagangan di Indonesia, hampir semua usaha bisnis menggunakan pihak perantara. Akibatnya terdapat kekosongan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi diantara penjual, perantara, dan konsumen. Padahal apabila ditelaah secara lebih jauh, hubungan antara penjual pedagang perantara, distributor atau agen hubungannya lebih kompleks, bukan hanya semata-mata hubungan penjual dan konsumen saja sebagaimana yang diatur dalam UUPK¹⁷.

Dalam Permendagri No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti, Pasal 9 disebutkan bahwa Perusahaan perantara dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat perjanjian tertulis dengan penjual yang dalam hal ini bisa berwujud perantara. Perjanjian ini, diharuskan memuat lingkup kegiatan yang ditugaskan kepada perantara, obyek barang yang akan dijual, hak dan kewajiban para pihak, nilai atau prosentase dan tata cara pembayara

¹⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bnadung; Alfabeta, 2009), hlm 74.

¹⁶ Andyna Susiawati Achmad & Astrid Athina Indradew, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021

¹⁷ *Ibid*

komisi, masa berlaku perjanjian yang meliputi masa aktif dan masa pasif, dan penyelesaian perselisihan.

Dalam hukum perdata dan hukum dagang, perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam melakukan suatu hal tertentu yang menimbulkan akibat hukum. bentuk perjanjian merupakan rangkaian kata-kata atau kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditulis. pada umumnya perjanjian tidak terikat suatu bentuk tertentu.

Para pelaku pedagang perantara ini tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, sementara UUPK tidak menyebutkan secara spesifik bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akhir mungkin melibatkan perantara¹⁸. Maka harus dipahami bahwa perantara ini ada yang bertindak untuk dan atas nama produsen, adapula perantara-perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. UUPK memandang perantara adalah perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sehingga dianggap bahwa hubungan hukumnya murni adalah antara pelaku usaha dengan konsumen akhir secara bertahap sekalipun itu melibatkan perantara.

¹⁸ Andyna Susiawati Achmad & Astrid Athina Indradewi, *Op Cit*

Secara yuridis, perantara melalui perjanjian perburuhan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhaap 1 (satu) orang atau lebih. Perjanjian pemberi kuasa adalah suatu perjanjian seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu kuasa. Penentuan upah yang terdapat pada Pasal 1794 BW, perjanjian kuasa bersifat cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, maka tidak boleh lebih dari yang ditentukan pasal 411 BW.¹⁹

Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa:

- 1) Hubungan principal makelar bersifat sementara atau tidak tetap.
- 2) Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal.
- 3) Makelar bukan para pihak (sehingga tidak

¹⁹ Tieffani Mega, 2012, Perantara Dalam Perdagangan. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2019 dari [Http:tieffani mega.blogspot.com/2012/04/perantara-dalam-perdagangan.html?m=1](http://tieffani mega.blogspot.com/2012/04/perantara-dalam-perdagangan.html?m=1).

dapat dituntut sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat).

- 4) Makelar berhak atas upah atau provinsi dari principal.

Dengan mengacu pada kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa bila seseorang telah menandatangani suatu kontrak, membawa konsekuensi yuridis. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan: Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pedagang perantara adalah orang atau pihak yang membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh upah/komisi. Pedagang perantara adalah lastgeving yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian,

khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Perlindungan hukum terhadap pelaku pedagang perantara dan perantara perdagangan ialah, berupa perjanjian yang berisi suatu rangkaian atau kalimat-kalimat yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pelaku pedagang perantara ini tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, sementara UUPK tidak menyebutkan secara spesifik bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akhir mungkin melibatkan perantara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Stella, Budiman Ginting, O. K. Saidin & T. K. D. Azwar, 2022. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen Dalam E-Commerce*, Acta Law Journal, Volume 1 Nomor 1, December;
- Erie Hariyanto, 2011. *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*, Surabaya; Pena Salsabila,
- Ridwan khairandy, 1999. *Pengantar Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta; Gama Media;
- Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, 2020. “Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2;
- Wahyu Kuncoro, 2015, *Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Raih Asa Sukses*, Tangerang,
- Nur Sulistyو Budi Ambarini, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, 2018. “Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4;743– 62;
- M. Manulang, 1985, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta-Medan : BKLM,
- Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru,
- Farida Hasyim, 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Sutarno, 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bnadung; Alfabeta,
- Andyna Susiawati Achmad & Astrid Athina Indradew, 2021. *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang*, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4 Nomor 2 Agustus;
- Tieffani Mega, 2012, *Perantara Dalam Perdagangan*. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2019 dari [Http:tieffani-mega.blogspot.com/2012/04/perantara-dalam-perdagangan.html?m=1](http://tieffani-mega.blogspot.com/2012/04/perantara-dalam-perdagangan.html?m=1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*